

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asikin, Zainal dan Amirudi, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama.
- F.X. Djumaldji & Wiwoho Soejono, 1987. *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*. Bina Aksara. Jakarta.
- Efendie, Lotulung Paulus, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Effendi, Irzal dan Oktariza, Wawan 2006, *Manajemen Agribisnis Perikanan*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.
- Fachruddin, Irfan, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni, Bandung.
- Hayati, Eny, 2005, *Ironi Pahlawan Devisa Kisah TKI dalam Laporan Jurnalistik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (edisi revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Je Seong, Joen dan Yuwanto, 2014, *Era Emas Hubungan Korea Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta.

Khakim, Abdul, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Munir, Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta.

Narbuko, Chalil dan Abu Achmadi, 1997, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka

Rasyid Thalib, Abdul, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Schilder dan J.G. Brouwer, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen .

Stout HD. de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni, Bandung.

Subhan, Hadi, dkk. 2012, *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Tribawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Husni, Lalu, *Penempatan dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Asas Hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Guna Mewujudkan Penempatan & Perlindungan TKI yang Bermartabat)*, Fakultas Hukum Unram, Nusa Tenggara Barat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No. 1, Maret 2011.

Ikawati & Purnomo, Damar Budi, *Defisit Pelaut di Negeri Bahari*, Jurnal Maritim Edisi 10 Februari 2014.

Pratiwi, Anwar Ratih, *Tenaga Kerja Indonesia Sektor Perikanan di Kapal Berbendera Korea Selatan*, INAKOS Journal Vol III No 2 April 2017, Korean Studies in Indonesia.

Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV tahun 2000, Universitas Parahyangan. Bandung

___, *Tambah Kuota Pengiriman TKI Formal ke Korea*, M Power: Jendela Informasi Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian, Volume 7 No. 6, Agustus 2012.

Sumber Lain

Asia Pacific Mission for Migrants Report, 2009, *Tripple Whammy : A Study on the Contemporary Situation and Problems of Indonesian Migrant Workers in Taiwa.*, Asia Pacific Mission for Migrants (APMM).

Budyana, Sari Happy, 2006, *Peranan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di PT. FUMIRA Semarang Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, Skripsi, Undip Semarang.

Dwi Rahayu, Meilasari, 2015, *Pengawasan Terhadap PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Pra Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri)*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

Farbenblum, Bassina, dkk., 2013, *Akses Buruh Migran terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*. Open Society Foundations, New York.

Federasi Buruh Transport Internasional (ITF), 2007, *Konvensi ILO tentang Bekerja di Industri Perikanan, Panduan untuk Serikat Pekerja*, ITF. London.

- Hidayat, Mohammad Jumhur, 2013, *Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Promosi, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Menggunakan Soft Systems Methodology*, Universitas Indonesia, Depok.
- Hidriyah, Sita, 2014, *Kasus Tenggelamnya Kapal Oryong 501 dan Perlindungan TKI AKPI*, Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VI. No. 23/IP3DI/Desember/2014, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Kantaprawira, Rusadi, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Kementerian Luar Negeri, 2011, *Kajian Upaya Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Mandak Y, 2004, *Tingkat Kesejahteraan Nelayan Hand Line di Desa Faer dan Letman Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil*, Skripsi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura Ambon
- Mulyosudarmo, Suwoto, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia. Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Monintja. D, 2001, *Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap*, Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir, Institut Pertanian Bogor
- M. Hadjon, Philipus, ____. *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga. Surabaya.
- Nurhakim S, 2002, *Peran Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Perikanan*, Jakarta: Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI)

- Purwanto, Yuli, dkk, 2014, *Aspek Keselamatan Ditinjau dari Stabilitas Kapal dan Regulasi pada Kapal Pole and Line di Bitung, Sulawesi Utara*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Rai Astawa, I Dewa, 2006, *Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ratna Wulandari, Viky, 2007, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Kapal Terhadap Risiko Bahaya di Laut pada PT. Pelayaran Indonesia (Pelni) Semarang*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Situmorang, Basani, 2012, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Lembaga Pengerah Tenaga Kerja (PPTKIS) dalam Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Susilo, Wahyu, *Involusi Kebijakan Buruh Migran Indonesia*, Paper disajikan dalam International Seminar “Ten Years Along Decentralization in Indonesia”, Diselenggarakan oleh UNIKA Atmajaya, HuMA, Leiden University and Radboud University, Jakarta, 16 Juli 2008.
- Stringer, Crhistina dkk, 2011, *Not in New Zealand’s Waters. Surely? Labour and Human Rights Abuses Aboard Foreign Fishing Vessels*, New Zealand Asia Institute: New Zealand.
- Tim Bahasa Pustaka, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- T. Lackey, Robert, 2005, *Fisheries: history. science. and management.* dalam Water Encyclopedia: Surface and Agricultural Water, Jay H. Lehr and Jack Keeley. editors. John Wiley and Sons. Inc.. Publishers. New York.

Internet

BNP2TKI, 2016, *Pengumuman dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015*, Dimuat dalam http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_01-02-2016_122032_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_TAHUN_2015.pdf diakses pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 18.23 Wib.

BNP2TKI, 2016, *Pengumuman Pemberitahuan untuk CTKI Re-Entry Program G to G Korea*. <http://www.bnp2tki.go.id/read/11132/PENGUMUMAN-PEMBERITAHUAN-UNTUK-CTKI-RE-ENTRY-PROGRAM-G-TO-G-KOREA-.html> diakses pada tanggal 2 Juni 2017 pukul 16.59 Wib.

Fasabeni, Muhammad, 2015, *Ratifikasi Konvensi ILO dan Perlindungan AKPI*. dimuat dalam <http://www.gresnews.com/berita/sosial/1730248-ratifikasi-konvensi-ilo-dan-perlindungan-AKPI/3/> diakses pada tanggal 28 April 2017 pukul 05.45 Wib.

Info Publik, 6 Juni 2015, *Pekerja Perikanan Punya Sejumlah Masalah, BPSDM KKP Siapkan Sertifikasi*. Dimuat dalam <http://infopublik.id/read/117525/pekerja-perikanan-punyasejumlah-masalah-bpsdm-kp-siapkan-sertifikasi-profesi.html>, diakses tanggal 23 Mei 2017 pukul 16.53 Wib.

International Organization for Migration, 2010, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia*, Publikasi IOM Jakarta. Indonesia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, 2013, *Mengenai Pelayanan Warga Negara Indonesia: Ketenagakerjaan*, Dimuat dalam <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-07-14-59-13/25-indonesian/hubungan-bilateral> Diakses pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 13.27 Wib.

Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat, 2016, *Trafficking in Persons 2016, Republik of Korea, Country Narrative*, Dimuat dalam website <http://www.state.gov/document/organization/258880.pdf> diakses pada tanggal 29 Mei 2017 pukul 17.09 Wib.

Migran Forum in Asia, 2014, *South Korea's Employment Permit System A Successful Government to Government Model, Open Working Group on Labour Migration and Recruitment Policy Brief No. #2*, dimuat dalam <http://mfasia.org/migrantforumasia/wp-content/uploads/2017/01/2-Policy-Brief-South-Koreas-EPS-A-Successful-G2G-Model.pdf>, diakses tanggal 2 Juni 2017 pukul 21.30 Wib.

MoU Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia & Kementerian Pekerjaan dan Tenaga Kerja Republik Korea, 2013, Dimuat dalam http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/2558_KOR-2013-0110.pdf diakses pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 13.31 Wib.

Pusat Sumber Daya Buruh Migran, *Sebuah Catatan Tentang Kondisi Penampungan*, Dimuat <http://buruhmigran.or.id/2011/01/25/sebuah-catatan-tentang-kondisi-penampungan/> diakses pada tanggal 18 Januari 2016 pkl 16.30.

Seafish, 2015, *South Korea Profile, Seafish Ethics Profile*, Dimuat dalam http://www.seafish.org/media/Publications/SouthKoreaEthicsProfile_2015_09.pdf diakses pada tanggal 29 Mei 2017 pukul 16.41 Wib.

Serikat Buruh Migran Indonesia, *Menolak Biaya Mahal Penempatan Buruh Migran*, Dimuat dalam website <http://sbmi.or.id/menolak-biaya-mahal-penempatan-buruh-migran/> diakses pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 16.49 Wib.

Sinar Harapan, *BNP2TKI Grebek BLK Ilegal di Ciputat*, Dimuat dalam website <http://www.sinarharapan.co/news/read/140903193/bnp2tki-grebek-blk-ilegal-di-ciputat> diakses pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 21.12 Wib.

Situs Resmi KBRI di Seoul, 2013, *Hubungan Bilateral*, Dimuat dalam <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-07-14-59-13/25-indonesian/hubungan-bilateral> diakses pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 13.19 Wib.

Syafi'I, Imam, 2017, *Urusan TKI Bukan Soal Tumpang Tindih Kewenangan Antara Kemnaker dan BNP2TKI*, Wakil Ketua Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), Dimuat dalam portal berita daring http://www.kompasiana.com/fspiln/urusan-tki-bukan-soal-tumpang-tindih-antara-kemnaker-dan-bnp2tki_56d009eac923bd2a1132e5ff diakses pada tanggal 18 Mei 2017 Pukul 09.59 Wib.

Uwiyono, Aloysius, 2007, *Refleksi Masalah Hukum Perburuhan Tahun 2005 dan Tren Hukum Perburuhan Tahun 2006*, <http://www.ui.edu/post/masalah-hukum-perburuhanid.html?UI=1430d40982dba04f7be423337e312f95> diakses pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 16.34 Wib.

Peraturan Perundang-undangan

Convention on The International Regulation for Preventing Collision at Sea (COLLREG) 1972.

Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels 1975.

Torremolinos The Safety of Fishing Vessels Conventios 1977.

Voluntary Guidelines for The Design, Construction, and Equipment of Small Fishing Vessels 1980.

Protocol Torremolinos 1993.

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fisheries (STCW-F) 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1847:23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2004 No. 133 dan tambahan lembaran No. 4445.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 1996 Tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2004 Tentang syarat desain dan peralatan kapal penangkap ikan.

Peraturan Menteri Perhubungan KM. 9 Tahun 2005 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Ujian Serta Sertifikasi Bagi Pelaut Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Kepala BNP2TKI No. 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perekrutan Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing.